

Strategi Pemerintah Terhadap Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Baranti

¹Nurhalianti, ²Sapri, ³Sundari, ⁴Abd. Razak Useng
^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Korespondensi : nurhalianti06@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah terhadap efektivitas penyaluran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan populasi sebanyak 487 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) aktif PKH. Sampel penelitian berjumlah 83 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan skala Likert, uji validitas, uji reliabilitas, dan statistik deskriptif dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS 32. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah berada pada kategori sangat baik dengan persentase 76%, efektivitas penyaluran PKH berada pada kategori baik sebesar 70%, dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah berada pada kategori baik sebesar 73%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas strategi pemerintah berkontribusi terhadap efektivitas penyaluran PKH di Kecamatan Baranti. Meskipun demikian, pemutakhiran data, penanganan keluhan KPM, ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, serta pemahaman dan partisipasi masyarakat masih perlu mendapat perhatian untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.

Kata kunci: Strategi Pemerintah, Efektivitas Penyaluran Bantuan, Program Keluarga Harapan

Abstract

This study aims to analyze the government's strategy toward the effectiveness of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) distribution in Baranti District, Sidenreng Rappang Regency, and to identify the factors influencing its implementation. The study employed a descriptive quantitative approach with a population of 487 active PKH beneficiary families. A sample of 83 respondents was selected using the Slovin formula and a simple random sampling technique. Data were collected through observation, interviews, questionnaires, and literature review. Data analysis was conducted using a Likert scale, validity and reliability tests, as well as descriptive statistical analysis with the assistance of IBM SPSS version 32. The results indicate that the government's strategy was categorized as very good, with a score of 76%, while the effectiveness of PKH distribution was categorized as good, with a score of 70%. In addition, the factors influencing the government's strategy were also classified as good, with a score of 73%. The study concludes that improvements in the quality of government strategy contribute to the effectiveness of PKH distribution in Baranti District. Nevertheless, greater attention is still needed in updating beneficiary data, handling beneficiaries' complaints, ensuring targeting accuracy, maintaining timely distribution, and enhancing community understanding and participation in order to optimize program implementation.

Keyword: Government Strategy, Distribution Effectiveness, Family Hope Program

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang masih menjadi tantangan bagi hampir seluruh negara, baik negara berkembang maupun negara maju, karena memiliki sifat yang kompleks dan multidimensional. Kondisi kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kualitas hidup, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi, serta ketersediaan sarana dan prasarana dasar (Museliza et al., 2020).

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan struktural yang menyebabkan proses penganggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara cepat. Oleh karena itu, pemerintah terus mengimplementasikan berbagai kebijakan perlindungan sosial sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat (Azzahra & Safitri, 2024).

Salah satu bentuk program perlindungan sosial yang menjadi instrumen strategis pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong dalam kelompok masyarakat sangat miskin. PKH memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap berbagai layanan dasar yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan kondisi ekonomi (Arlayati & Ikhwan, 2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Pulau Sulawesi, yakni mencapai 698,13 ribu jiwa pada Maret 2025. Sementara itu, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 9,48%, dengan mayoritas keluarga miskin tercatat sebagai penerima berbagai program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) (BPS, 2025).

Landasan hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai upaya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan sosial harus berlangsung secara efektif dan efisien dengan memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Meskipun demikian, hasil observasi awal di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran PKH masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek ketepatan sasaran dan ketepatan waktu. Temuan tersebut sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa implementasi PKH di berbagai daerah masih mengalami permasalahan dalam penentuan sasaran penerima akibat ketidakakuratan data penduduk (Fajri et al., 2022). Selain itu, ketidakkonsistenan jadwal penyaluran bantuan juga menjadi kendala yang dapat menyulitkan keluarga penerima manfaat dalam mengelola kebutuhan dan pengeluaran rumah tangga mereka (Prichatin, 2021).

Kecamatan Baranti dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristik sosial ekonominya yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan pekerjaan informal, sehingga tingkat kerentanan pendapatan rumah tangga cenderung tinggi. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan ini mengalami peningkatan, dari 408 KPM pada tahun 2024 menjadi 487 KPM pada tahun 2025. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menerapkan strategi yang lebih efektif agar proses penyaluran bantuan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan program. Sejumlah penelitian sebelumnya mengenai PKH di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya berfokus pada implementasi program dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus dan komprehensif membahas strategi pemerintah dalam menjamin ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan kualitas penyaluran bantuan masih terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penyaluran PKH di Kecamatan Baranti serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus menjadi bahan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Secara teoritis, keberhasilan penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dipengaruhi oleh strategi yang dirancang pemerintah. Bryson (2011) menyatakan bahwa perencanaan strategis yang baik merupakan fondasi penting bagi organisasi publik dalam mencapai tujuan program secara efektif. Sementara itu, Subarsono (2011) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi informasi, serta tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Temuan Larasati dan Jannah (2022) mengenai transfer kebijakan bantuan tunai bersyarat di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan sosial sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan di tingkat lokal. Selain itu, Hidayat (2020) menegaskan pentingnya evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bantuan sosial memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan penerima manfaat. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, penelitian ini mengkaji hubungan antara strategi pemerintah dan efektivitas penyaluran PKH sebagai dasar dalam memahami pelaksanaan program di tingkat lapangan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sugiyono (2024) menjelaskan bahwa metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis nilai suatu variabel secara independen tanpa membandingkannya maupun menghubungkannya dengan variabel lain. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dipilih karena daerah tersebut termasuk wilayah yang aktif dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Populasi penelitian terdiri atas seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) aktif PKH di Kecamatan Baranti yang berjumlah 487 KPM pada periode Oktober–Desember 2025. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga diperoleh 83 responden sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah probability sampling dengan metode simple random sampling, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a) Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi, situasi, serta pelaksanaan kegiatan yang menjadi fokus penelitian di lapangan.
- b) Wawancara
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab kepada narasumber/informan untuk memperoleh data atau informasi di lapangan.
- c) Studi kepustakaan (library research)
Studi kepustakaan yaitu proses mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, internet, laporan penelitian, atau database akademik lainnya.
- d) Kuesioner
Kuesioner, yaitu mengajukan daftar pernyataan atau pertanyaan secara tertulis mengenai permasalahan yang akan diteliti berupa angket-angket yang akan didarkan kepada responden untuk memperoleh pendapat atau tanggapan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta peraturan perundang-undangan. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Baik (4), Baik (3), Tidak Baik (2), dan Sangat Tidak Baik (1). Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan dalam bentuk persentase dengan kategori Sangat Baik (76%–100%), Baik (51%–75%), Tidak Baik (26%–50%), dan Sangat Tidak Baik (0%–25%).

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 32. Proses analisis meliputi uji validitas dengan kriteria Corrected Item-Total Correlation $\geq 0,30$ serta uji reliabilitas yang menggunakan nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$, serta analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk

menyajikan gambaran karakteristik data berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. (Sugiyono, 2024). Variabel Strategi Pemerintah (X) diukur berdasarkan teori Perencanaan Strategis yang dikemukakan oleh Bryson (2011), yang mencakup tiga indikator, yaitu perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Sementara itu, variabel Efektivitas Penyaluran PKH (Y) diukur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang terdiri atas lima indikator, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah dianalisis berdasarkan pendapat Subarsono (2011), yang meliputi kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemahaman dan partisipasi masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum tahap analisis data dilakukan, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan setiap butir pertanyaan dalam mengukur variabel yang diteliti. Uji validitas bertujuan untuk menilai ketepatan instrumen dalam mengukur variabel yang diteliti, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi jawaban responden terhadap item pertanyaan. Adapun hasil uji validitas instrumen penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Uji Validitas Data

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Strategi Pemerintah (X)	1	0,638	0,216	Valid
	2	0,771	0,216	Valid
	3	0,744	0,216	Valid
	4	0,727	0,216	Valid
	5	0,495	0,216	Valid
	6	0,692	0,216	Valid
	7	0,729	0,216	Valid
	8	0,513	0,216	Valid
Efektivitas Penyaluran (Y)	1	0,690	0,216	Valid
	2	0,610	0,216	Valid
	3	0,672	0,216	Valid
	4	0,857	0,216	Valid
	5	0,608	0,216	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memperoleh nilai r hitung yang melebihi nilai r tabel (0,216). Dengan demikian, seluruh item memenuhi kriteria validitas dan dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

Setelah seluruh item pertanyaan dinyatakan valid, dilakukan uji reliabilitas guna mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian. Pengujian reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan nilai batas minimum 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas untuk setiap variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kriteria	Keterangan
Strategi Pemerintah	0,819	> 0,60	Reliabel
Efektivitas Penyaluran	0,713	> 0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel strategi pemerintah memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,819, sedangkan variabel efektivitas penyaluran PKH memperoleh nilai sebesar 0,713. Kedua nilai tersebut berada di atas batas minimum 0,60, sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak untuk mengumpulkan data penelitian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), yang mengacu pada Teori Perencanaan Strategis Bryson (2011), diukur melalui tiga indikator, yaitu perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Berdasarkan hasil analisis, indikator pelaksanaan strategi memperoleh nilai tertinggi sebesar 78%, diikuti oleh perencanaan strategi sebesar 76%, sedangkan evaluasi strategi memperoleh nilai terendah sebesar 75%. Secara keseluruhan, variabel strategi pemerintah mencapai nilai rata-rata sebesar 76% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Pada aspek perencanaan, proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai telah berjalan dengan baik, meskipun sebagian responden masih menilai bahwa akurasi pendataan di lapangan perlu ditingkatkan. Selain itu, kejelasan kriteria penerima manfaat dan jadwal penyaluran bantuan juga dinilai cukup baik. Pada aspek pelaksanaan, proses pencairan bantuan melalui bank atau agen penyalur serta peran pendamping PKH telah terlaksana sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Sementara itu, pada aspek evaluasi, kegiatan monitoring penyaluran oleh pemerintah desa atau kelurahan dinilai berjalan sangat baik. Namun demikian, penanganan keluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta upaya perbaikan terhadap kendala penyaluran masih dianggap belum sepenuhnya responsif.

Temuan penelitian ini mendukung pandangan Bryson (2011) yang menyatakan bahwa perencanaan strategis yang disusun secara partisipatif dan disertai evaluasi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingginya capaian pada indikator pelaksanaan strategi ini konsisten dengan hasil penelitian Larasati dan Jannah (2022) yang mengungkapkan bahwa kesiapan kelembagaan di tingkat lokal berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program bantuan tunai bersyarat. Meskipun demikian, nilai yang relatif lebih rendah pada indikator evaluasi strategi menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik antara masyarakat dan pemerintah masih memerlukan penguatan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Hidayat (2020) yang menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan faktor penting untuk memastikan program bantuan sosial tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penerima manfaat di lapangan.

Efektivitas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pada penelitian ini diukur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang mencakup lima indikator, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator tepat jumlah memperoleh nilai tertinggi sebesar 77%, diikuti oleh tepat kualitas sebesar 74%, tepat administrasi sebesar 73%, tepat waktu sebesar 64%, dan tepat sasaran sebagai indikator dengan nilai terendah sebesar 63%. Secara keseluruhan, efektivitas penyaluran PKH mencapai rata-rata 70% dan berada pada kategori baik. Rendahnya capaian pada indikator tepat sasaran dan tepat waktu menunjukkan bahwa akurasi data penerima manfaat serta konsistensi jadwal penyaluran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fajri et al. (2022) yang mengungkapkan adanya kesalahan penargetan akibat inclusion error dan exclusion error, serta penelitian Prichatin (2021) yang menyatakan bahwa keterlambatan penyaluran bantuan secara berulang dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi

keluarga miskin. Di sisi lain, indikator ketepatan jumlah bantuan, kualitas layanan, dan kelengkapan administrasi memperoleh penilaian yang baik dari responden, yang menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditinjau secara keseluruhan, gabungan nilai variabel Strategi Pemerintah dan Efektivitas Penyaluran PKH mencapai 74%, yang termasuk dalam kategori baik.

Capaian kategori baik pada variabel efektivitas penyaluran PKH sejalan dengan temuan Museliza dkk. (2020), yang menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan secara umum memberikan kontribusi yang positif terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. Namun, tingkat efektivitas program tersebut sangat dipengaruhi oleh akurasi data penerima serta konsistensi pelaksanaan jadwal penyaluran di setiap daerah. Perbedaan capaian pada masing-masing indikator dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa aspek teknis penyaluran, seperti ketepatan jumlah bantuan dan kualitas layanan, cenderung lebih mudah dikelola oleh pemerintah dibandingkan aspek pendataan penerima manfaat yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, pembaruan data penerima perlu dilakukan secara berkala dan terintegrasi dengan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai upaya meningkatkan akurasi penetapan sasaran penerima bantuan dan efektivitas program secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang memengaruhi strategi pemerintah dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dianalisis berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Subarsono (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator koordinasi antarlembaga memperoleh nilai tertinggi sebesar 75%, diikuti oleh kapasitas sumber daya manusia sebesar 74%, teknologi informasi sebesar 72%, serta pemahaman dan partisipasi masyarakat dengan nilai terendah sebesar 70%. Secara keseluruhan, rata-rata nilai faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah mencapai 73% dan termasuk dalam kategori baik. Tingginya capaian pada indikator koordinasi antarlembaga menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah kecamatan, Dinas Sosial, pendamping PKH, dan pihak perbankan telah berperan penting dalam mendukung kelancaran proses penyaluran bantuan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2015) yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga sering kali menjadi penyebab keterlambatan dan ketidakefisienan dalam implementasi program. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia pelaksana program dinilai telah memadai, meskipun upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan secara berkelanjutan tetap diperlukan sebagaimana dikemukakan oleh Wahyuni dan Susilawati (2022). Di sisi lain, keterbatasan sebagian masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi serta rendahnya tingkat partisipasi dalam kegiatan sosialisasi masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, peningkatan akses informasi dan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mendukung penyaluran PKH yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan kerangka yang dikemukakan oleh Subarsono (2011), yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, teknologi informasi, serta pemahaman dan partisipasi masyarakat merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tingginya capaian pada indikator koordinasi antarlembaga menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Baranti. Sementara itu, capaian yang relatif lebih rendah pada indikator pemahaman dan partisipasi masyarakat mengindikasikan bahwa sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih belum memahami secara optimal hak dan kewajibannya sebagai penerima manfaat. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pendamping atau petugas PKH, sehingga informasi mengenai program belum terserap secara maksimal oleh sebagian penerima manfaat.

Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kecamatan Baranti untuk meningkatkan kualitas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di masa mendatang. Upaya peningkatan sinkronisasi data antara data terpadu kesejahteraan sosial di tingkat desa dan sistem pusat perlu terus dilakukan guna memastikan penetapan Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) menjadi lebih akurat serta mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah kecamatan bersama pendamping PKH perlu mengoptimalkan kegiatan sosialisasi melalui pendekatan yang lebih intensif dan mudah dipahami oleh masyarakat, mengingat indikator pemahaman dan partisipasi masyarakat masih memperoleh capaian terendah dibandingkan faktor-faktor pendukung strategi pemerintah lainnya. Di samping itu, koordinasi antarlembaga yang telah terlaksana dengan baik selama ini perlu dijaga keberlanjutannya serta terus dikembangkan sebagai praktik yang efektif serta dapat diterapkan pada program bantuan sosial lainnya di wilayah tersebut. Melalui sinergi antara akurasi data penerima, ketepatan pelaksanaan jadwal penyaluran, dan meningkatnya partisipasi masyarakat, efektivitas penyaluran PKH di Kecamatan Baranti diharapkan dapat terus mengalami peningkatan pada periode-periode selanjutnya.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik strategi pemerintah yang dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, maka semakin tinggi efektivitas penyaluran PKH di Kecamatan Baranti. Namun, pemutakhiran data, penanganan keluhan KPM, ketepatan sasaran penerima, dan ketepatan jadwal penyaluran masih memerlukan perhatian. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih aktif mengikuti sosialisasi dan berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan PKH dengan memberikan masukan, kritik, atau laporan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah terhadap efektivitas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Baranti berada pada kategori baik dengan persentase gabungan kedua variabel sebesar 74%. Strategi pemerintah yang diukur melalui aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi berada pada kategori sangat baik (76%), meskipun pemutakhiran data dan penanganan keluhan KPM masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, efektivitas penyaluran PKH yang diukur melalui tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi berada pada kategori baik (70%), meskipun ketepatan sasaran dan ketepatan waktu sebagai aspek yang memerlukan perhatian lebih. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah yakni kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, teknologi informasi, serta pemahaman dan partisipasi masyarakat berada pada kategori baik (73%), dengan koordinasi antarlembaga sebagai faktor yang paling dominan, sedangkan pemahaman dan partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat.

5. SARAN

Pemerintah Kecamatan Baranti dan Dinas Sosial diharapkan terus meningkatkan akurasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala agar penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan konsistensi jadwal penyaluran dan responsivitas dalam penanganan keluhan. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif mengikuti sosialisasi dan berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan PKH dengan memberikan masukan, kritik, atau laporan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain, memperluas cakupan lokasi penelitian, atau menerapkan metode yang berbeda guna memperoleh hasil kajian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arlayati, A., & Ikhwan, I. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih. *Jurnal Ilmiah*, 8(1), 187–199.
- [2] Azzahra, S. A., & Safitri, D. (2024). Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 3045–3055.
- [3] BPS. (2025). Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang.
- [4] Bryson, J. M. (2011). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (4th ed.). Jossey-Bass.
- [5] Fajri, M., Rahman, A., & Sumirat, E. (2022). Kesalahan Targeting pada Program Keluarga Harapan: Studi Kasus di Tiga Provinsi. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 9(3), 112–135.
- [6] Hidayat, R. (2020). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Konteks Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(4), 234–252.
- [7] Larasati, B., & Jannah, L. M. (2022). Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(1).
- [8] Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Kedua). UPP STIM YKPN.
- [9] Museliza, V., Afrizal, & Eliza, R. (2020). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 118–127. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.116bps>
- [10] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. (2018).
- [11] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2017).
- [12] Prichatin, A. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas) [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- [13] Sahida, Nur, M., & Erfina. (2025). Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 13(1), 90–103.
- [14] Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
- [15] Sugiyono, P. D. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- [16] Wahyuni, S., & Susilawati, T. (2022). Peran Pendampingan dalam Meningkatkan Efektivitas Program Keluarga Harapan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(3), 289–308.